MI'RAJ DODI KURNIAWAN
ANDI SUWIRTA

Membangun Peradaban Indonesia Melalui Ikhtiar Pendidikan yang Bercorak Alternatif dan Kritis

ABSTRAK: *Kenyataan adanya cara pandang dan praktek tidak manusiawi terhadap manusia merupakan persoalan terbesar kehidupan. Dalam lintasan sejarah, problema ini tidak saja menjejak melainkan juga acapkali dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan ikhtiar-ikhtiar penanggulangan menuju peradaban. Pendidikan – terutama yang muncul dan kerap disebut sebagai pendidikan alternatif dan kritis – turut ambil bagian untuk menjadi solusi dari permasalahan ini. Pendidikan alternatif dan kritis meninjau ulang permasalahan pendidikan yang sesungguhnya, menggauli wacana hegemoni politik dan ekonomi negara berkembang dan negara maju serta masyarakat perkotaan dan pedesaan, mempelajari kembali arah pendidikan untuk kekinian dan masa depan kemanusiaan, serta mengkaji falsafah pendidikan. Dengan beberapa tinjauan kritis dan solusi alternatif, pendidikan yang bercorak alternatif dan kritis menjadikan kehidupan anak-anak miskin, terlantar, dan anak-anak jalanan di Indonesia sebagai bagian terpenting dari lokus dan fokus misi humanisasi melalui pendidikan. Melalui desain pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat serta berorientasi kepada masa kini dan masa depan peserta didik, akhirnya pendidikan alternatif-kritis bukan hanya alternatif pinggiran untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi merupakan solusi utama yang layak diharapkan untuk meraih peradaban.*

KATA KUNCI: *Pendidikan alternatif-kritis, peradaban Indonesia, problema pendidikan dasar, serta pendidikan untuk masa kini dan masa depan.*

Mi'raj Dodi Kurniawan, S.Pd. adalah Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung tahun 2006 dan sekarang mengajar di SD (Sekolah Dasar) Negeri Talaga 1 dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 1 Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. **Andi Suwirta, M.Hum.** adalah Ketua Umum ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) di Bandung. Mereka dapat dihubungi dengan alamat e-mail: atriwusidna@gmail.com

PENGANTAR

Zaman baru yang maju beriringan dengan keterbelakangan. Kendati cenderung kebablasan di satu pihak, namun pada pihak lain masih terlihat menapaki rute (*on the track*) pembangunan peradaban. Kemajuan bukan saja terjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam teknologi. Meski belum sepenuhnya memenuhi taraf kememadaian fungsinya sebagai penerang dan memudahkan dalam menghadapi kegelapan dan tantangan hidup, akan tetapi ilmu pengetahuan *kiwari* relatif sukses mengkanvaskan sistem pemikiran irrasional. Fenomena ini beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi (Mohamad, 2011).

Sebuah perkembangan dalam menggauli agama juga terjadi, yakni didekati dengan modus berpikir rasional. Agama bukan lagi benda menakutkan, atau sesuatu yang *taken for granted* (diterima begitu saja), tetapi sebagai bagian dari kehidupan manusia yang layak dijadikan "sahabat" dan ajarannya dapat dibedah dan dikomparasikan dengan renik-renik kehidupan. Agama bukan lagi sebuah medium tanpa kritik, melainkan terbukti telah dan tengah dikritik oleh banyak kalangan (Madjid, 1998). Dengan begini, agama sebagai sebuah sistem ajaran dan sistem sosial tidak saja dituntut paripurna, melainkan juga ditantang untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pelik kehidupan manusia.

Domain kekuasaan bukan lagi wilayah eksklusif dan tak tersentuh. Kekuasaan mulai dikritik dari berbagai penjuru. Ia dibedah oleh aneka perspektif. Bahkan kekuasaan juga telah didistribusikan sedemikian luas. Filsuf Perancis, J.J. Montesquie, telah membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan *legislatif* (perwakilan/pembuat peraturan), *yudikatif* (hukum), dan *eksekutif* (pelaksana pemerintahan). Bahkan dalam wajah kontemporernya, kekuasaan juga merambah domain yang tak kasat mata. Kekuasaan dipegang oleh pengusaha transnasional, nasional, dan lokal, serta kekuasaan media, kekuasaan rakyat biasa, dan kekuasaan masyarakat kelas ekonomi menengah (Budiardjo, 1999). Kekuasaan yang dahulu dipandang sebagai sosok-sosok atau lembaga-lembaga formal, kini semakin terlihat tersebar dalam berbagai lini kehidupan. Distribusi kekuasaan yang tersebar ini membuat penyelesaian masalah kehidupan sulit dilakukan oleh inisiatif sepihak, melainkan harus didukung oleh seluruh pihak.

Sayangnya, alih-alih mampu menyelesaikan semua persoalan yang datang, dunia ini malah terkesan *sumpek* dengan aneka persoalan lainnya. Beberapa di antaranya merupakan persoalan klasik, namun masalah

lainnya termasuk masalah baru, sebagai konsekuensi atau efek samping (*side effect*) dari kemajuan yang diraih dalam beberapa aspek. Masalah ini di antaranya berkisar belum efektif dan efisiennya upaya penyadaran (*conscientization*) massa, konflik perebutan ruang-ruang kekuasaan dan ekonomi, distribusi penguasaan intelektual dan material, *miss management* (salah kelola) masalah pribadi (*private*) dan kemasyarakatan (*public*), *miss conception* (salah paham) terhadap sistem keyakinan (agama/ideologi), *miss management* (salah kelola) dalam menghirup kebebasan, *miss management* (salah kelola) dalam mengeksploitasi kekayaan alam, serta ketidakseimbangan dalam menata etos kesederhanaan dengan etos kemajuan material (Soemarwoto, 1997).

Dalam suasana seperti itu, pendidikan sulit untuk tinggal diam. Pada saat yang sama, pendidikan berlaku sebagai subjek sekaligus objek dinamika zaman. Pendidikan digiring untuk memperkuat kebiadaban atau menjadi oase untuk meraih peradaban. Keduanya menjadi pilihan yang terkesan mudah dalam spektrum teoritik, namun merupakan pilihan yang sulit dalam arus praksis (Suyanto, 2006). Ada kalanya pendidikan seperti oase atau cahaya untuk merengkuh tujuan penciptaan peradaban, namun geraknya terkesan rigid, sesak, fatamorgana, dan cahayanya redup. Semua itu karena mekanisme yang saling terkait antara satu aspek dengan aspek lainnya. Dan manakala kepentingan penyadaran massa terpinggirkan dan terabaikan, maka yang terjadi malah merebaknya penyimpangan hasrat ekonomi dan politik.

PENDIDIKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PESERTA DIDIK DAN MASYARAKAT

Seharusnya bukan hasrat memenuhi keinginan yang tidak terbatas yang dilayani, melainkan hasrat untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Keharusan untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri lebih manusiawi dan bersesuaian dengan tujuan penciptaan kehidupan ini. Sejarah telah membuktikan bahwa adanya kebutuhan dan kreativitas umat manusia di muka bumi dalam memenuhi berbagai harapan yang membuat makhluk ini menjadi manusia dan layak menempati posisi sebagai wakil Tuhan di muka bumi (Ahmad & Suwirta, 2007).

Terdapat beberapa hal universal yang menjadi kebutuhan manusia. Di antaranya: (1) Kebutuhan untuk hidup; (2) Kebutuhan mendapatkan ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu memilih jalan hidup dengan bertanggung jawab; (3) Kebutuhan untuk hidup aman dan tentram; (4) Kebutuhan untuk berpenghasilan sehingga mampu memenuhi

kehidupan; (5) Kebutuhan untuk memenuhi sandang dan pakaian yang layak; (6) Kebutuhan untuk makan dan minum yang bergizi; (7) Kebutuhan untuk bertempat tinggal yang manusiawi; (8) Kebutuhan untuk menyampaikan pendapat di muka umum; (9) Kebutuhan untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi; (10) Kebutuhan untuk mengaktualisasikan kemampuan dirinya; dan (11) Kebutuhan untuk mendapatkan perlakuan adil di depan hukum.[1]

Sistem dan lembaga pendidikan yang terbaik tentu saja harus berpijak dan berjuang untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan universal di atas. Adalah kurang beradab dan preseden buruk belaka manakala sistem dan lembaga pendidikan malah menggiring peserta didik dan masyarakat menjadi budak-budak sistem sosial yang tidak beradab, bersifat *asosial* (mengabaikan kondisi sosial), *ahistoris* (mengabaikan sejarah), dan mengabaikan kenyataan bahwa suatu saat nanti akan menemukan kehidupan akhirat dan adanya hari pembalasan yang abadi. Sebaliknya, pendidikan yang beradab adalah pendidikan yang mentransformasikan kesadaran sebagai makhluk bebas yang bertanggung jawab untuk memperkuat bangunan peradaban, menyeimbangkan identitasnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, menyadari sejarahnya, serta menyadari bahwa suatu saat manusia akan menemukan kehidupan yang lebih abadi di akhirat nanti (Weinata, 2008).

Maka sistem dan lembaga pendidikan seharusnya berpijak dan bergerak di atas landasan kebutuhan masyarakat dan ditantang untuk mentransformasikan kesadaran kepada peserta didik khususnya dan masyarakat umumnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pendidikan

[1]Kebutuhan-kebutuhan manusiawi ini setidak-tidaknya dapat mengacu kepada "Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia" atau IUDHR (*Islamic Universal Declaration of Human Rights*) yang dihasilkan oleh sebagian ahli, sarjana, pemuka agama, dan intelektual Muslim pada tahun 1980-an. Deklarasi ini memuat berbagai hak yang berkaitan dengan: (1) hak untuk hidup; (2) hak akan kebebasan; (3) hak akan keadilan dan memperoleh perlakuan yang adil; (4) hak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan; (5) hak memperoleh perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang; (6) hak perlindungan akan martabat dan nama baik; (7) hak suaka politik; (8) hak minoritas; (9) hak dan kewajiban untuk terlibat dalam perkara publik; (10) hak kebebasan untuk berkeyakinan, berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berserikat; (11) hak akan kesejahteraan ekonomi dan hasil-hasil pembangunan; (12) hak perlindungan terhadap hak milik; (13) hak memperoleh status dan martabat kerja; (14) hak akan keamanan sosial; (15) hak berkeluarga; (16) hak wanita untuk dinikahi; (17) hak akan pendidikan; serta (18) hak kebebasan untuk bergerak dan menetap. Seluruh isi (*contents*) hak tersebut cukup lengkap dan sejalan dengan dokumen HAM (Hak Asasi Manusia) dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) seperti *Universal Declaration of Human Rights,* Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik, dan sebagainya. Penjelasan relatif memadai dan singkat mengenai bahasan ini dapat dibaca dalam Adnan Buyung Nasution (1996:105-120).

bukan saja dituntut menjadikan peserta didik menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terampil dan ahli mengerjakan sesuatu, melainkan juga – seperti kata Louis O. Kattsoff (1992) – pendidikan harus membuat peserta didik menjadi bijaksana.

Mengenai Problema Pendidikan Dasar. Meyke Simboh (2010) mengupas hasil Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang menjelaskan bahwa pendidikan dasar diperluas sebagai pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar dasar dari semua orang melalui berbagai sistem pengajaran, persekolahan formal, pendidikan non-formal, dan persekolahan alternatif untuk mereka yang terbatas atau tiada akses pada persekolahan formal.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Wajib Belajar 9 tahun bagi anak-anak usia 7 – 15 tahun melalui pendidikan dasar di SD (Sekolah Dasar) atau MI (*Madrasaha Ibtidaiyah*) dan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) atau MTs (*Madrasah Tsanawiyah*). Harapan yang digantungkan dalam dunia pendidikan dasar cukup besar untuk mampu mendorong berkurangnya penduduk miskin. Akan tetapi, kenyataan menunjukan bahwa masih terdapat banyak sekali anak yang tidak sekolah dan putus sekolah dalam kelompok-kelompok masyarakat pedesaan dan/atau masyarakat terpencil, keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi/miskin, anak-anak perempuan, dan penyandang cacat. Itu disebabkan karena belum maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, terutama pendidikan dasar (Suyanto, 2006).

Kenyataanya, kritik terhadap sekolah muncul karena sekolah tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar yang begitu besar. Hal itu bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh beberapa pengkritik pendidikan dunia yang mengamati dan meneliti pendidikan di sekolah, seperti Paulo Freire (1985, 1987, dan 1997); Evert Reimer (2000); dan Ivan Illich (2000). Mereka menilai bahwa sekolah tidaklah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu berpikir kritis dan kreatif, karena sekolah lebih mengandalkan hafalan-hafalan yang terkadang tidak dimengerti oleh anak/siswa. Mereka menuding sekolah hanya mampu menciptakan perbedaan hierarki/kelas dalam masyarakat atau menjadi lembaga diskriminasi, serta sekolah tidak mampu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia karena menganakemaskan sebagian kecil siswa dan menggusur anak-anak kaum miskin dari proses belajar yang menguntungkan.

Kritik terhadap sekolah itu sendiri di Indonesia telah dilakukan oleh banyak pakar dari berbagai bidang. Di antaranya adalah oleh budayawan

yang juga tokoh agama Katolik (Pastur), yaitu Y.B. Mangun Wijaya atau lebih dikenal dengan sebutan "Romo Mangun". Menurutnya, pendidikan dasar yang dilaksanakan saat ini hanya diperuntukkan pada mereka yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Dan pendidikan di sini tidak membuat anak-anak *survive* dan independen. Oleh karenanya tidak perlu heran bila terjadi pengangguran intelektual, karena para lulusannya lebih cenderung meminta pekerjaan ketimbang berkreasi membuat lapangan kerja sendiri (dalam Topatimasang, 2003).

Hal yang sama terungkap dari laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO (*United Nations for Education, Scientific, and Cultural Organization*) yang bekerja sama dengan UNDP (*United Nations for Development Program*) tahun 1998 melalui program APPEAL (*Asia Pasific Programme of Education for All)* yang mengidentifikasi bahwa pendidikan dasar yang dilaksanakan saat ini tidak dirancang secara khusus untuk mengurangi kemiskinan; program-program yang ada tidak difokuskan pada keaksaraan untuk tujuan tertentu, dan oleh sebab itu program tersebut tidak mempunyai dampak pada kelompok sasaran (dalam Simboh, 2010).

Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa susunan pembelajaran tidak diorganisasikan pada hal-hal yang berhubungan dengan orang miskin. Sebab, krikulum yang ada sangat tidak memuat keterampilan. Di samping itu, isi kurikulum seperti hak-hak anak, hak-hak perempuan, dan hak-hak manusia yang sangat diharapkan peduli terhadap orang-orang miskin sangat jarang ditemukan (Kurniawan, 2006).

PENDIDIKAN UNTUK MASA KINI DAN MASA DEPAN

Telah disampaikan di muka bahwa titik tolak pendidikan itu sendiri adalah kebutuhan masyarakat. Dalam ranah waktu, pendidikan harus mengacu dan mengarah kepada jiwa zaman (*zeitgeist*) masa kini dan kecenderungan masa depan. Masuk akal dan sederhana saja menemukan alasan mengapa pendidikan harus mengarah kepada masa kini dan masa depan, karena kehidupan ini – setelah melalui masa lampau (*the past*) – menjejak ke masa kini (*the present*) dan menuju ke masa depan (*the future*). Selain perlu memahami realitas zaman sekarang, tentu perlu pula memahami – setidak-tidaknya – kecenderungan yang akan terjadi di masa depan. Dengan demikian, pendidikan bertujuan menyiapkan peserta didik agar mampu meraih kesempurnaan hidup di masa kini dan mencapai kehidupan beradab di masa depan (Suyanto, 2006; dan Weinata, 2008).

Dengan demikian, rigiditas dalam menyusun program dan melaksanakan pendidikan yang mengabaikan realita zaman sekarang dan kecenderungan

yang akan terjadi di masa yang akan datang mesti dijauhi. Apalagi pola pikir dan acuan pendidikan ke masa lalu. Kecuali jika sejarah (masa lalu) dijadikan pelajaran untuk mendesain pendidikan dan membangun masa kini dan masa depan. Pendidikan yang mengambil pelajaran dari masa lampau bukan saja boleh ditempuh, akan tetapi juga sudah semestinya. Dengan demikian, pendidikan akan memperbaiki dan lebih menyempurnakan kesalahan dan keberhasilan masa lalu pada zaman sekarang dan masa depan (Abdul Razaq & Suwirta, 2007).

Dalam spektrum orientasi ke masa kini dan masa depan inilah sejumlah mentalitas yang penting dimiliki oleh masyarakat umumnya dan khususnya peserta didik, dikemukakan oleh Koentjaraningrat sebagai berikut:

> Dengan singkat: Suatu bangsa yang hendak mengintensifkan usaha untuk pembangunan harus berusaha agar banyak dari warganya lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan, dan demikian bersifat hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan; lebih menilai tinggi hasrat exploitasi untuk mempertinggi kapasitas berinovasi; lebih menilai tinggi orientasi ke arah *achievement* dari karya; dan akhirnya menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya kepada diri sendiri, berdisiplin murni, dan berani bertanggung jawab sendiri (Koentjaraningrat, 1985:36).

Mengenai Hakekat Manusia. Louis O. Kattsoff, guru besar filsafat pada North Carolina University, Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa sesungguhnya bentuk-bentuk pemerintahan dan pendidikan sangat bergantung pada pandangan kita tentang manusia. Masalah ini adalah yang paling sulit dan luar biasa pentingnya dewasa ini, tetapi banyak orang mencari penyelesaian-penyelesaian yang mudah (Kattsoff, 1992:395).

Manusia memang makhluk unik. Manusia tidak hanya berusaha menyusun suatu pandangan dunia, melainkan merenungkan dan merenungkan kembali hakekatnya sendiri. Manusia merupakan objek penyelidikan yang berharga, karena ia sendiri yang menyelidiki dirinya, dan bahkan pikirannya dikacaukan oleh dirinya sendiri. Amsal yang banyak jumlahnya di dalam segala bahasa membuktikan bahwa manusia mempersoalkan dirinya sendiri (Kattsoff, 1992:398).

Untuk membedah hakekat manusia, Louis O. Kattsoff (1992:406418-) lantas menuturkan beberapa penyelesaian dari berbagai pandangan dunia. Sejumlah langkah penyelesaian yang dikumpulkan dan dipaparkannya, antara lain: (1) Penyelesaian *realisme klasik*; (2) Penyelesaian *teologisme*; (3) Penyelesaian *idealisme*; dan (4) Penyelesaian *materialisme historis*.

Menurut *realisme klasik,* manusia memiliki hakekat rangkap, yakni hahekat fisik dan hahekat akali (tidak bersifat fisik/material). Dalam

pandangan Aristoteles, manusia disebut makhluk *hylomorfis.* Artinya, manusia mempunyai dua unsur penyusun dirinya: materi (yang dapat menerima bentuk manusia) dan bentuk manusia itu sendiri. Ciri terpokok bentuk ini dinamakan juga jiwa atau *psyche*, yaitu kemampuan berpikir. Manusia mempunyai dua bagian yang hakiki dan dua prinsip yang menyusunnya, yakni raga material yang terorganisir dan hidup rasional (jiwa/*psyche*) yang menggerakkannya (dalam Kattsoff, 1992).

Selanjutnya, pandangan *teologisme* melihat hubungan manusia dengan Tuhan bersifat khas. Tuhan merupakan unsur transendensi yang mengacu kepada sesuatu yang lebih besar di luar manusia, yang diyakini akan memberikan petunjuk benar kepada manusia. Kekhasan hubungan tersebut membedakan hubungan Tuhan dengan makhluk-makhluk lainnya, selain manusia.

Menurut Reinhold Niebuhr, terdapat dua suasana (keadaan/lingkungan) hidup manusia. Keadaan pertama merupakan anak alam, mengalami perubahan, dipaksa oleh kebutuhan-kebutuhan yang mutlak, didorong oleh detak hatinya, dan terbatas waktunya sesuai dengan bentuk-bentuk organisnya yang beraneka. Keadaan kedua ialah manusia merupakan roh yang berada di luar alam, hidup, dirinya sendiri, akalnya, dan dunia. Ini artinya, manusia merupakan makhluk yang keadaan dalamnya terbagi-bagi. Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk yang bebas, tetapi juga merupakan mahluk yang berdosa, dan dibuat "menurut citra Tuhan" (dalam Kattsoff, 1992).

Idealisme pula memandang manusia dengan jalan meneliti kebudayaannya, yaitu apa yang ia hasilkan dan merupakan sesuatu yang khas baginya. Kebudayaan yang dicipta oleh manusia ini lahir dari kinerja akal dan jiwanya (ide/*idea*) sebagai hewan rasional. Tetapi manusia tidak hanya hidup dengan akalnya; ia mengalami rasa takut, mempunyai harapan-harapan, dan ia menafsirkan pengalaman-pengalaman berdasarkan agama atau mitos (Suwirta, 2005). Singkatnya – meminjam pendapat Ernst Cassirer (1990) – manusia terlibat dalam suatu jalinan simbol-simbol yang diungkapkan melalui dan di dalam bahasa-bahasa yang dipakainya, bentuk-bentuk keseniannya, simbol-simbol mitosnya, dan upacara-upacara keagamaannya. Hal ini seakan matra baru dari kenyataan. Seekor binatang melihat makanan dan akan memakannya bila ia merasa lapar; manusia melihat makanan, dan baginya makanan itu mungkin merupakan simbol dari Tuhan atau suatu pantangan.

Akhirnya, *materialisme historis* menguraikan paparannya sendiri untuk menjawab pertanyaan, apakah manusia itu? *Materialisme historis* memandang bahwa hakekat manusia berubah-ubah dari waktu ke waktu

(perjalanan sejarah). Kondisi berubah-ubah ini terlihat manakala meneliti tingkah-laku dan kemampuan individu-individu manusia dalam suatu lingkungan fisik dan sejarah yang mereka ubah. Dengan demikian, mereka mengubah diri mereka sendiri. Tetapi perubahan yang umum terjadi bercorak khusus. *Materialisme historis* juga memandang perbedaan antara manusia dengan binatang terletak dalam kemampuannya menguasai alam melalui teknologi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan (dalam Kattsoff, 1992).

Akhirnya, penelusuran mengenai hakekat manusia ini, memang, menyisakan beberapa pemikiran untuk memilih salah satunya, seluruhnya, sebagian di antaranya, atau memilih mana di antaranya yang nyata dan bermanfaat untuk perbaikan tata peradaban di masa mendatang. Tetapi untuk memahami hakekat manusia ini, setidak-tidaknya menurut pandangan kami, izinkanlah untuk mengambil sikap di antara berbagai pandangan yang mengemuka. Hakekat manusia dapat dilihat berdasarkan objek dan dari berbagai sudut pandang. Hakekat manusia, menurut kenyataan dan nilai-nilai idealnya, antara lain: (1) Makhluk hidup yang tersusun dari unsur fisik dan jiwa; (2) Makhluk yang memiliki kebebasan memilih berdasarkan daya pikirnya; (3) Makhluk Tuhan dan memiliki martabat berbeda yang signifikan dengan makhluk lainnya semata-mata dalam hal keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan berdasarkan daya pikirnya; (4) Makhluk berpikir dan bertingkah-laku atau bekerja; (5) Makluk simbolis; (6) Makhluk politik; (7) Makhluk individu dan sosial; serta (8) Makhluk berakhlak.

DESAIN PENDIDIKAN ALTERNATIF-KRITIS

Terdapat beberapa kecerdasan yang mengemuka hingga sekarang, yang perlu dimiliki oleh setiap orang, khususnya oleh peserta didik, antara lain kecerdasan intelektual (*intellectual intellegences*), kecerdasan emosional (*emotional intellegences*), kecerdasan fisik/gerak motorik, dan kecerdasan spiritual (*spiritual intellegences*). Kepemilikan kecerdasan-kecerdasan tersebut bukan saja dapat memanusiawikan manusia, namun juga – karenanya – acap menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan kontemporer (Palmer, 2003; dan Weinata, 2008).

Dengan empat sasaran kecerdasan yang harus dikuasai oleh peserta didik, pendidikan bukan saja relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat serta kondisi masa kini dan masa mendatang, melainkan juga merupakan peralatan (*tools*) bagi peserta didik dalam menapaki zaman yang semakin beradab di masa depan. Dengan aneka kecerdasan tersebut, peserta didik harus mampu berpikir bebas sesuai dengan aturan-

aturan logika serta bahan-bahan bukti dan pendapat-pendapat yang benar dan relevan, mampu menemukan nafkah untuk kehidupan yang layak (manusiawi/beradab), menjadi ahli yang cakap dalam satu atau beberapa bidang kehidupan, serta – tentu saja – mampu memanusiawikan manusia (dirinya dan orang lain).

Indonesia, jelas, bukanlah negara komunis. Indonesia juga bukan merupakan negara fascis. Indonesia bukan negara liberal (bebas) tanpa aturan. Indonesia bukan negara agama (teokrasi atau negara dengan satu agama). Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila. Kendati bukan negara agama dengan satu agama, namun alih-alih bertentangan dengan agama, kenyataannya justeru Pancasila itu sendiri merupakan saripati dari ajaran universal agama sebagai payung yang menaungi pluralitas yang hadir di dalamnya (Budiardjo, 1999).

Sayangnya, tidak sedikit kasus bahwa kehidupan di negeri ini, terutama roda pemerintahan, berkontradiksi dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Demikian juga dalam koridor pendidikan. Banyak kasus mengabarkan bahwa pendidikan (formal) menjadi sebatas ritual dengan pemaknaan yang dangkal, untuk memperoleh ijazah, atau karena paksaan dari pemerintah (pihak luar). Pendidikan non-formal dan lulusannya pula menemukan hambatan kultural dan struktural dalam memperbaiki taraf hidup. Pendidikan informal di keluarga juga menemukan batu sandungan dari individu-individu keluarga dan masyarakat yang relatif belum mumpuni dalam pelaksanaan pendidikan informal (Suyanto, 2006).

Ada pula "pendidikan" yang timpang atau tidak relevan antara tujuan, proses, dan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang. Sebagian kasus mengabarkan bahwa *output* (lulusan) pendidikan menjadi penjahat kerah putih. Bahkan kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan masih merebak (Topatimasang, 2003; dan Suyanto, 2006). Dalam lingkup pendidikan swasta, komersialisasi pendidikan semacam itu mungkin dapat diterima. Namun dalam konteks pendidikan negeri, sungguh hal ini tidak masuk akal, sebab manyalahi konstitusi. Sebagian lulusan pendidikan menganggur dan belum mampu mencapai taraf hidup yang layak.

Dalam konteks ini, Ivan Illich (2000), seorang pemikir pendidikan emansipatoris, berpendapat bahwa sistem pendidikan formal telah menjalankan tiga fungsi umum, yakni: (1) menjadi gudang mitos masyarakat; (2) pelembagaan kontradiksi dalam mitos tersebut; dan (3) lokus ritual yang mereproduksi serta menyelubungi perbedaan antara mitos dan realitas (Illich, 2000; dan Palmer, 2003).

Sebagaimana Karl Marx, yang pernah menyodorkan pernyataan "agama itu candu" yang menggegerkan itu – untuk menegaskan dan

mengkritik fenomena agama yang terkesan diam saja dan melegitimasi praktek-praktek penindasan – maka aktivis pendidikan di Tanah Air, Roem Topatimasang,[2] mengupas ketidaksaktian pendidikan dalam bukunya yang berjudul *Sekolah itu Candu* (2003). Intinya, Roem Topatimasang melihat berbagai kelemahan dalam modus-modus pendidikan formal (konvensional) yang alih-alih memanusiawikan manusia, yang terjadi malah membuat peserta didik tidak berdaya dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya.

Pendidikan itu sendiri adalah usaha atau ikhtiar sadar untuk memanusiawikan manusia. Pendidikan menjadi medium bagi pelaku pendidikan, khususnya peserta didik, dari kondisi tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi mampu, dan dari tidak mau menjadi mau melakukan perbaikan kualitas hidup. Dalam prakteknya, kegiatan pendidikan ini harus bersandar kepada kamauan dan kesenangan untuk melaksanakan proses pendidikan.

Apa dasar atau pijakan dalam melaksanakan pendidikan? Proses pendidikan di Indonesia, jelas harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD (Undang-Undang Dasar) tahun 1945. Kedua pijakan ini, menurut kami, berakar pada tiga landasan kuat, yaitu: (1) Nilai-nilai agama; (2) Kebudayaan nasional Indonesia; dan (3) Tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh desain pendidikan alternatif yang kritis. Di antaranya adalah kurikulum pendidikan, lembaga (wadah pelaksanaan) pendidikan, sumber atau acuan pembelajaran, tenaga pendidik, lingkungan pendidikan, sarana pendidikan, peserta didik yang memiliki kemauan tinggi untuk melaksanakan proses pendidikan, serta evaluasi pendidikan (Nasution, 1982:2024-).

Desain pendidikan alternatif-kritis harus memantik munculnya kesadaran untuk memperbaiki keadaan. Tentu saja, hal ini dilakukan dengan dan pasca mencapai *command of fundamental processes,* yakni penguasaan kecakapan-kecakapan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dengan tiga kecakapan fundamental ini, pendidikan alternatif-kritis mentransformasikan dan memantik hadirnya kekuatan kultural berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemauan untuk memperbaiki keadaan, terutama dalam konteks kesehatan (*health*), ekonomi (sumber penghasilan yang memadai), memperbaiki pakaian dan tata ruang tempat tinggal, *vocational efficiency*, memperbaiki akhlak anggota keluarga dan lingkungan pergaulan, *citizenship* (kewarganegaraan) dan *civic*

[2]Roem Topatimasang adalah aktivis "pendidikan alternatif" lulusan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Bandung yang sekarang menjadi UPI (Universitas Pendidikan Indonesia). Roem Topatimasang juga mengkritik pendidikan konvensional lewat bukunya itu (2003).

responsibility (tanggung jawab warga negara), serta pencapaian tingkat ketaatan agama (Nasution, 1982; dan Weinata, 2008).

Dengan kecakapan fundamental itu pendidikan alternatif-kritis mentransformasikan dan merangsang hadirnya kekuatan positif berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemauan untuk memperbaiki keadaan. Kekuatan positif ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya dalam berpartai dan berwarga negara, malainkan yang lebih substanstif dari itu adalah kecerdasan dalam mengidentifikasi hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang adil, budaya taat hukum, kecerdasan dalam menyampaikan pendapat dan berorganisasi, serta mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan kemauan untuk berjuang membumikan nilai-nilai universal (Budiardjo, 1999; dan Suwirta, 2005).

Akhirnya, pendidikan alternatif yang kritis harus mentransformasikan kesadaran manusiawi sebagai bagian dari makro kosmos (alam semesta) dan kesadaran manusiawi sebagai makhluk Tuhan yang suatu saat kelak akan meninggal dan menghadapi hari pembalasan. Manusia itu sendiri merupakan mikro kosmos di antara semesta planet-planet, udara, tumbuhan, binatang, dan tanah. Manusia bukan makhluk yang hidup dan musnah selamanya, melainkan makhluk yang akan meninggal, lalu menghadapi kehidupan akhirat dan hari pembalasan. Pendek kata, kesadaran manusiawi mewujud dalam penciptaan peradaban. Selain harus taat terhadap ajaran agama, peradaban juga terbentuk dari tata cara kehidupan yang beradab, serta dihuni oleh individu-individu dan mayarakat yang memiliki kesadaran lingkungan dan mempertahankan kelangsungan hidup.[3]

Dalam kehidupan sosial-ekonomi yang timpang (sistem penindasan) akibat budaya dan struktur politik yang menindas, Paulo Freire (1985 dan 1987) menyodorkan model pendidikan alternatif-kritis bagi kaum tertindas. Pendidikan bagi kaum tertindas – dalam pandangannya – adalah pendidikan yang harus dilaksanakan *bersama*, bukan *untuk*, kaum tertindas (individu atau manusia secara keseluruhan) dalam wujud perjuangan tanpa henti untuk meraih kembali kemanusiaan mereka. Pendidikan ini membuat penindasan dan penyebabnya menjadi objek refleksi kaum tertindas, dan dari refleksi itulah lahir pembebasan (Freire, 1985 dan 1987; Palmer, 2003; dan Kurniawan, 2006).

Dalam konteks pendidikan alternatif-kritis bagi anak-anak miskin, anak-anak terlantar, dan anak-anak jalanan, Meyke Simboh (2010) mengemukakan

[3]Adalah menarik bahwa Kepala Suku Seattle (Indian Amerika Utara) pernah berkata sebagai berikut: "*Jika manusia meludahi tanah, mereka meludahi diri sendiri. Kita tahu, bumi bukan milik manusia, manusialah milik bumi*". Selanjutnya, baca Steve Pollock (2006:29).

bahwa ikhtiar untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya untuk membebaskan diri dari kebodohan, imbalan upah rendah, kekerasan, dan adanya ketidakadilan dalam masyarakat, terutama untuk anak-anak miskin, perlu dilaksanakan secara komperhensif, serta melibatkan semua pihak, karena bentuk pendidikan anak miskin harus mengandung nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, toleransi, solidaritas, menghormati alam, serta berbagi dengan sesama.

Dengan menggunakan berbagai pendekatan – seperti pendekatan sosial-budaya, managerial, dan yang paling utama adalah model belajar yang dipadukan dengan *life skill education* – maka pendidikan yang bermuara pada belajar untuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, berpikir kreatif, kritis, pendidikan keterampilan fungsional, kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran diri akan menjadi kenyataan. Pendidikan bagi anak miskin, jelas bukanlah pendidikan tentang menghafal dengan benar pasal-pasal dalam UUD 1945, apa dan bagaimana menggunakan mikroskop, siapa penemu ini dan itu, ataupun berapa banyak kota besar di Indonesia. Akan tetapi belajar bagi anak miskin dan tersisih adalah bagaimana dia sekaligus dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan penghasilan; dalam artian, pendidikan yang diajarkan benar-benar merupakan kebutuhan mereka, seperti belajar mengenal huruf, kemudian bisa membaca, mengenal angka, dan kemudian bisa berhitung (Saripudin & Karim, 2009).

Pendidikan bagi anak miskin, anak terlantar, dan anak jalanan juga harus mendidik mereka bagaimana menghindar dari ancaman kekerasan dan bahaya lainnya, bagaimana mengolah usaha, menghitung hasil usaha, bagaimana meningkatkan pendapatan dan memperoleh pemberian kredit/modal, bahan, alat serta bagaimana memasarkan hasil usaha/kerajinan agar anak-anak itu tidak hanya belajar, tetapi juga memperoleh penghasilan (Saripudin & Karim, 2009; dan Simboh, 2010). Mengapa? Karena anak-anak miskin itu pun merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian pendidikan, sesuai konstitusi UUD 1945, agar dapat bersama-sama membangun negara tanpa harus melalui konflik fisik ataupun sosial.

PENUTUP

Dalam konteks pelaksanaan pendidikan alternatif-kritis, khususnya manakala menghadapi persoalan anak-anak miskin, terlantar, dan jalanan, langkah kerja sama yang padu di antara sekolah, orang tua, dan guru jelas penting. Aparat-aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, terutama

aparatus pendidikan, jelas bertanggung jawab dalam mentransformasikan kesadaran dan melakukan kerja sama yang padu dengan orang tua dan guru serta peserta didik mengenai pentingnya mensukseskan program pendidikan yang mencerdaskan.

Kalaupun kesadaran dari para orang tua yang anaknya miskin, anak terlantar, dan anak jalanan tersebut sulit diharapkan dan membutuhkan waktu yang terlalu lama, maka garda terakhir untuk merealisasikan pendidikan alternatif-kritis adalah sekolah dan guru. Melalui desain pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat serta berorientasi kepada masa kini dan masa depan peserta didik, akhirnya pendidikan alternatif-kritis bukan hanya alternatif pinggiran untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi merupakan solusi utama yang layak diharapkan untuk meraih peradaban (*civilization*).

Bibliografi

Ahmad, Abdul Razaq & Andi Suwirta. (2007). *Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia dan Indonesia.* Bandung dan Bangi: UPI [Universitas Pendidikan Indonesia] Press dan Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Arkoun, Muhammad. (1999). *Membongkar Wacana Akademik.* Surabaya: Penerbit Al-Fikr, Terjemahan.

Budiardjo, Miriam. (1999). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

Cassirer, Ernst. (1990). *Manusia dan Kebudayaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Terjemahan.

Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas RI.

Freire, Paulo. (1985). *Pendidikan Kaum Tertindas.* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti Pers, Terjemahan.

Freire, Paulo. (1987). *Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan*. Yogyakarta: Bentang Budaya, Terjemahan.

Freire, Paulo. (1997). *Sekolah adalah Kapitalisme Licik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.

Illich, Ivan. (2000). *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. Yogyakarta: Bentang Budaya, Terjemahan.

Kattsoff, Louis O. (1992). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, Terjemahan.

Koentjaraningrat. (1985). *Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Gramedia.

Kurniawan, Mi'raj Dodi. (2006). "Pembaruan Pemikiran Pendidikan Paulo Freire (1921-1997)". *Skripsi Sarjana Pendidikan Tidak Diterbitkan.* Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.

Madjid, Nurcholish. (1998). "Islam, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi". *Makalah* disampaikan pada salah satu seminar di IAIN [Institut Agama Islam Negeri] Sunan Gunung Djati di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Mohamad, Baharom. (2011). "Teknologi Komunikasi dan Maklumat dalam Program Pendidikan Khas Aliran Teknik dan Vokasional di Malaysia" dalam *ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan*, 1(1) Juni, hlm.4158-. Abstrak dan artikel lengkap tersedia di: www.atikan-jurnal.com

Nasr, Sayyed Hossein. (1983). *Islam dan Nestapa Manusia Modern.* Bandung: Penerbit Pustaka, Terjemahan.

Nasution, Adnan Buyung. (1996). "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam dan Barat" dalam M. Natsir Tamara & Elza Peldi Taher [eds]. *Agama dan Dialog Antar Peradaban.* Jakarta: Penerbit Paramadina, hlm.105120-.

Nasution, Sorimuda. (1982). *Asas-Asas Kurikulum.* Bandung: Penerbit Jemmars.

Palmer, Joy A. (2003). *50 Pemikir Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Jendela, Terjemahan.

Pollock, Steve. (2006). *Penduduk*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Terjemahan.

Reimer, Evert. (2000). *Matinya Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.

Saripudin, Didin & Faridah Karim. (2009). "Program Resosialisasi Kanak-kanak Jalanan di Rumah Singgah: Satu Penilaian" dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 2(2) November. Abstrak dan artikel lengkap tersedia juga di: www.sosiohumanika-jpssk.com

Simboh, Meyke. (2010). "Pendidikan Alternatif bagi Anak Miskin, Terlantar, dan Jalanan" dalam www.jugaguru.com/document.php/document/article/5110// [diakses di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2011].

Soekanto, Soerjono. (1987). *Sosiologi: Suatu Pengantar.* Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Soemarwoto, Otto. (1997). *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suparlan, Parsudi. (1988). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suwirta, Andi. (2005). *Sejarah Intelektual: Percikan Pemikiran dari Dunia Barat dan Islam.* Bandung: Suci Press.

Suyanto. (2006). *Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global.* Jakarta: PSAP [Pusat Studi Agama dan Peradaban] Muhammadiyah.

Topatimasang, Roem. (2003). *Sekolah itu Candu.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Weinata, Sairin. (2008). *Pendidikan yang Mendidik.* Jakarta: Penerbit Yudisthira.



Melalui desain pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat serta berorientasi kepada masa kini dan masa depan peserta didik, akhirnya pendidikan alternatif-kritis bukan hanya alternatif pinggiran untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi merupakan solusi utama yang layak diharapkan untuk meraih peradaban (*civilization*).